



**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2017-2021**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**NIKMA SARI HARAHAP**

**NIM. 19 402 00106**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2017-2021**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**NIKMA SARI HARAHAHAP**

**NIM. 19 402 00106**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2017-2021**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**NIKMA SARI HARAHAHAP  
NIM.19 402 00106**

**Pembimbing I**

**Windari, S.E. M.A  
NIP.19830510201503203**

**Pembimbing II**

**Sarmiana Batubara, M.A  
NIP.198603272019032012**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

---

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Nikma Sari Harahap**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 17 April 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nikma Sari Harahap yang berjudul "*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PEMBIMBING I**

**Windari, S.E. M.A**  
**NIP. 1983051020150320**

**PEMBIMBING II**

**Sarmiana Batubara, M.A**  
**NIP. 198603272019032012**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nikma Sari Harahap**  
NIM : 19 402 00106  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan npsal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 April 2023  
Saya yang Menyatakan,



**Nikma Sari Harahap**  
**NIM. 19 402 00106**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nikma Sari Harahap  
NIM : 19 402 00106  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Tahun 2017-2021*". Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : 17 April 2023  
Yang menyatakan,



**Nikma Sari Harahap**  
**NIM. 19 402 00106**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nikma Sari Harahap  
NIM : 19 402 00106  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Tahun 2017-2021.

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si  
NIDN. 2026056902

Sekretaris

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E  
NIDN. 2027029303

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si  
NIDN. 2026056902

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.  
NIDN. 2027029303

Windari, S.E., M.A  
NIDN. 2010058301

Zulaika Matondang, M.Si  
NIDN. 2017058302

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Selasa/ 23 Mei 2023  
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : Lulus/ 74,5 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,83  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

---

## **PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  
Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021  
**Nama** : Nikma Sari Harahap  
**NIM** : 19 402 00106

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, Juni 2023  
Dekan,



  
Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19780818 200901 1 015



## ABSTRAK

**Nama : Nikma Sari Harahap**

**NIM : 19 402 00106**

**Judul : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2021 terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terdapat pula beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017-2021. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017-2021.

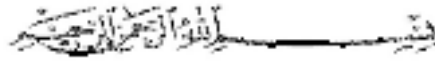
Pembahasan penelitian ini didukung oleh teori para ahli yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang didapatkan daerah yang dipungut menurut peraturan daerah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yang dilakukan dengan menggunakan data panel yaitu gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data dokumentasi yang tersedia, yaitu data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara pada tahun 2017 sampai 2021 sebanyak 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis data yang digunakan melalui program IMB SPSS *Statistics 23*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis maka diketahui bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi.**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021"**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser, M.Si., wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Rukiah, M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Windari, S.E., M.A, selaku pembimbing I dan Ibu Sarmiana Batubara, M.A. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syahada Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa dan terimakasih yang tak ternilai kepada kedua orangtua, Ibunda tercinta Ati Sumaati dan Ayahanda tercinta Mansur Harahap dan seluruh

keluarga besar yang telah banyak melimpahkan pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan do'a tulus yang senantiasa mengiringi langkah peneliti

8. Buat teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019, terima kasih atas dukungan, saran dan semangat nya kepala peneliti.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarobbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 17 April 2023  
Peneliti

**Nikma Sari Harahap**  
**NIM. 19 402 00106**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutahmati* yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutahitu* ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Padadasarnyasetiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri tudilalui oleh kata



sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. *Tajwid***

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Definisi Operasional Variabel.....	11
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Penelitian .....	13
G. Manfaat Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
A. Kerangka Teori.....	18
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	18
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	18
b. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi .....	20
c. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam .....	22
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	25
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	25
b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	26
3. Dana Perimbangan .....	29
a. Pengertian Dana Perimbangan .....	29
b. Jenis-jenis Dana Perimbangan .....	30
4. Desentralisasi Fiskal.....	33
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Pikir .....	38
D. Hipotesis.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel .....	41
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Teknik Analisis Data .....	44
1. Uji Estimasi Data Panel .....	44
2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel .....	46
3. Uji Asumsi Klasik.....	47
4. Uji Hipotesis .....	49

5. Regresi Linier Berganda .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara.....	53
1. Sejarah Umum Sumatera Utara.....	53
2. Lokasi dan Keadaan Geografis .....	54
3. Iklim .....	55
B. Gambaran Umum Variabel .....	55
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	55
2. Dana Perimbangan .....	57
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	59
C. Hasil Analisis Data.....	61
1. Pemilihan Uji Data Panel .....	61
2. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	61
3. Hasil Uji Hipotesis .....	64
4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	66
5. Pembahasan Hasil Penelitian .....	68
6. Keterbatasan Penelitian .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Daftar Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara..... 4
Tabel I.2	Pendapatan Asli Daerah di 6 Kabupaten/Kota ..... 7
Tabel I.3	Realisasi Dana Perimbangan di 6 Kabupaten/Kota ..... 8
Tabel I.4	Pertumbuhan Ekonomi di 6 Kabupaten/Kota ..... 9
Tabel I.5	Defenisi Operasional Variabel..... 12
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu ..... 36
Tabel III.1	Sampel Penelitian 6 Kabupaten/Kota ..... 43
Tabel IV.1	Pendapatan Asli Daerah di 6 KabupatenKota..... 56
Tabel IV.2	Realisasi Dana Perimbangnan di 6 Kabupaten/Kota ..... 58
Tabel IV.3	Pertumbuhan Ekonomi di 6 Kabupaten/Kota ..... 60
Tabel IV.4	Hasil Uji Data Panel ..... 61
Tabel IV.5	Hasil Uji Normalitas ..... 62
Tabel IV.6	Hasil Uji Multikolinearitas ..... 62
Tabel IV.7	Hasil Uji Autokorelasi ..... 63
Tabel IV.8	Hasil Uji t..... 64
Tabel IV.9	Hasil Uji f..... 65
Tabel IV.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )..... 65
Tabel IV.11	Hasil Uji Regresi Linier Berganda..... 66

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar IV.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 6 Kabupaten/Kota .....	56
Gambar IV.2 Dana Perimbangan di 6 Kabupaten/Kota .....	58
Gambar IV.3 Pertumbuhan Ekonomi di 6 Kabupaten/Kota.....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021
- Lampiran 2 Hasil Model *Common Effect*
- Lampiran 3 Hasil Model *Fixed Effect*
- Lampiran 4 Hasil Model *Random Effect*
- Lampiran 5 Hasil Uji *Chow*
- Lampiran 6 Hasil Uji *Hausman*
- Lampiran 7 Hasil Uji LM

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan sebagai proses, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dengan *output* per kapita, harus memperhatikan dua hal, yaitu *output* total (GDP) dan jumlah penduduk, karena *output* per kapita adalah *output* total dibagi dengan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu yang menggunakan indikator tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian.<sup>1</sup>

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Perekonomian Indonesia menunjukkan pergerakan yang baik, dengan diterapkannya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang

---

<sup>1</sup> Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). hlm. 23.

diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Melalui Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memperkuat hal tersebut maka lahirlah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, maka setiap daerah dapat mendorong peningkatan pendapatannya melalui kebijakan dan strategi yang dikembangkan.<sup>3</sup>

Implementasi dari penerapan desentralisasi di Indonesia berupa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah harus diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendanaan untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah. Melalui desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah melalui pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi menjadi penting karena sebagai tolak ukur

---

<sup>2</sup> Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>3</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017). hlm. 3.



keberhasilan penerapan desentralisasi fiskal, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah, maka semakin maju pula daerah tersebut.<sup>4</sup>

Implikasi pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah adanya penyerahan atau pelimpahan wewenang yang luas kepada daerah, yang membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, atau dikenal dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah distribusi sumber daya keuangan (*financial sharing*), yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan otonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>5</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih tinggi terjadi pada pemerintahan yang terdesentralisasi. Desentralisasi fiskal memberikan dampak yang positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi per kapita. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa desentralisasi fiskal yang telah diberlakukan di Indonesia akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup>

Desentralisasi fiskal ditandai dengan fenomena pemekaran wilayah di Indonesia. Implementasi fiskal di Provinsi Sumatera Utara juga ditandai dengan fenomena pemekaran wilayah dalam jumlah yang relatif signifikan,

---

<sup>4</sup> Wahyudi Kumarotomo, *Desentralisasi Fiskal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). hlm. 14.

<sup>5</sup> Priyarsono, *Analisis Pembangunan dalam Prespektif Ekonomi Regional*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2011). hlm. 147.

<sup>6</sup> Suwandi, *Desentralisasi Fiskal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). hlm. 73.

dimana hampir seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dilakukan pemekaran wilayah hingga saat ini Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten/Kota.<sup>7</sup> Dengan adanya pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Utara maka jumlah Kabupaten sekarang menjadi 25 Kabupaten dan jumlah Kota menjadi 8 Kota. Totalnya menjadi 33 Kabupaten/Kota. Adapun daftar Kabupaten /Kota di provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara**

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Keterangan
1.	Kab. Asahan	Kisaran	
2.	Kab. Batubara	Limapuluh	Pemekaran Kab. Asahan
3.	Kab. Dairi	Sidikalang	
4.	Kab. Deli Serdang	Lubuk Pakam	
5.	Kab. Humbahas	Dolok Sanggul	Pemekaran Kab. Tapanuli Utara
6.	Kab. Karo	Kaban Jahe	
7.	Kab. Labuhan Batu	Rantau Prapat	
8.	Kab. Labuhan Batu Utara	Aek Kanopan	Pemekaran Kab. Labuhan Batu
9.	Kab. Labuhan Batu Selatan	Kota Pinang	Pemekaran Kab. Labuhan Batu
10.	Kab. Langkat	Stabat	
11.	Kab. Mandailing Natal	Panyabungan	Pemekaran Kab. Tapanuli Selatan
12.	Kab. Nias	Gunung Sitoli	
13.	Kab. Nias Barat	Lahomi	Pemekaran Kab. Nias
14.	Kab. Nias Selatan	Teluk Dalam	Pemekaran Kab. Nias
15.	Kab. Nias Utara	Lotu	Pemekaran Kab. Nias
16.	Kab. Padanglawas	Sibuhuan	Pemekaran Kab. Tapanuli Selatan
17.	Kab. Padanglawas Utara	Gunung Tua	Pemekaran Kab. Tapanuli Selatan
18.	Kab. Pakpak Barat	Salak	Pemekaran Kab. Dairi
19.	Kab. Samosir	Pangururan	Pemekaran Kab. Tapanuli Utara

<sup>7</sup>Freddy Situngkir, dkk. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17 No. 3 Juli 2014. hlm. 127.

20.	Kab. Serdang Bedagai	Perbaungan	Pemekaran Kab. Deli Serdang
21.	Kab. Simalungun	Raya	
22.	Kab. Tapanuli Selatan	Sipirok	
23.	Kab. Tapanuli Tengah	Pandan	
24.	Kab. Tapanuli Utara	Tarutung	
25.	Kab. Toba Samosir	Balige	Pemekaran Kab. Tapanuli Utara
26.	Kota Binjai	-	
27.	Kota Gunung Sitoli	-	Pemekaran Kab. Nias
28.	Kota Medan	-	
29.	Kota Padangsidimpuan	-	
30.	Kota Pematang Siantar	-	
31.	Kota Sibolga	-	
32.	Kota Tanjung Balai	-	
33.	Kota Tebing Tinggi	-	

Sumber : BPS, Sumut Dalam Angka, 2021

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah.

Islam berpendapat tentang perlunya penerapan *multi-instrumen* dalam desentralisasi fiskal, mulai dari pemberian subsidi untuk pemerataan, kerangka pinjaman daerah, basis pajak daerah dan akuntabilitas demokrasi di tingkat daerah. Argumen ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebanyakan kebijakan desentralisasi punya tujuan jamak (*Multi-objective*), sehingga tujuannya tidak sekedar untuk efisiensi dan ketahanan fiskal tetapi juga untuk mengatasi ketimpangan antardaerah, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, peningkatan kemampuan daerah serta mengurangi kendala bagi lingkungan bisnis yang kompetitif.<sup>8</sup>

Desentralisasi fiskal dalam Islam memiliki hubungan dengan syariat Islam yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya

---

<sup>8</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

(*Mu'amalah*), oleh sebab itu hal ini merupakan bagian dari syariat Islam. Tanpa adanya rambu-rambu syariat Islam dalam desentralisasi fiskal maka dapat menjadikan alat penindasan rakyat. Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pendapatan daerah sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pendapatan daerah dianggap sebagai upeti, yaitu hak milik penuh sang raja). Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pendapatan boleh dipungut atau tidak. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah SWT), maka dia adalah zalim.<sup>9</sup>

Variabel dalam desentralisasi fiskal yang berkaitan erat dengan angka pertumbuhan ekonomi, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan. Berdasarkan perhitungan polulasi dan sampe terdapat 6 Kabupaten/Kota yang terdesentralisasi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021, yaitu: Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai. Dengan ketentuan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Dana Perimbangan yang mengalami penurunan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan yang diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang mengalami penurunan.

---

<sup>9</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm.20.

Dapat kita lihat bagaimana angka dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan di Kabupaten/Kota yang mengalami pemekaran Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 sampai tahun 2021, yang terdiri dari:

**Tabel I.2**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2018**

Tahun	Nias Utara	Nias Barat	Nias Selatan	Humbang Hasundutan	Pakpak Barat	Tanjung Balai
2017	7,000,000	3,600,000	10,794,743	3,167,028	1,134,706	7,083,418
2018	6,500,000	3,600,000	17,748,994	3,961,715	1,186,534	8,583,418
2019	6,500,000	7,594,400	15,330,442	3,961,715	2,144,273	2,708,466
2020	5,900,000	7,594,400	3,932,834	5,159,233	1,998,842	10,658,500
2021	3,945,000	8,562,900	4,542,498	6,029,770	4,391,000	11,658,500

*Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2021.*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 ke tahun 2018 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Nias Utara, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang memiliki nilai tetap adalah Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Humbang Hasudutan dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang memiliki nilai tetap adalah Kabupaten Nias Barat dan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Utara, Nias Selatan dan Pakpak Barat. Kemudian pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan dan Pakpak Barat, sedangkan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Utara dan Kota

Tanjung Balai. Dan untuk dana perimbangan dapat kita lihat ditabel berikut:

**Tabel I.3**  
**Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2018**

Tahun	Nias Utara	Nias Barat	Nias Selatan	Humban Hasundutan	Pakpak Barat	Tanjung Balai
2017	5,000,000	2,000,000	36,319,166	6,974,502	4,352,064	12,915,852
2018	1,500,000	2,000,000	37,203,232	17,640,162	4,816,911	14,488,537
2019	1,500,000	3,829,500	29,686,215	3,863,511	3,345,872	2,033,736
2020	2,100,000	3,829,500	4,785,675	4,458,583	4,247,300	25,601,771
2021	1,360,000	3,796,000	3,389,889	4,573,173	1,046,720	26,018,569

*Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2021.*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dana perimbangan pada tahun 2017 ke tahun 2018 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Nias Utara, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang memiliki nilai tetap adalah Kabupetan Nias Barat. Selanjutnya tahun 2019 ke tahun 2020 yang mengalami peningkatan adalah Kabupeten Nias Barat, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang memiliki nilai tetap adalah Kabupaten Nias Barat dan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Selatan. Kemudian pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu langkah utamanya dapat ditempuh melalui peningkatan *outpout* daerah atau dengan

kata lain melalui pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut data laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara.

**Tabel I.4**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Utara, Nias Barat,**  
**Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan**  
**Kota Tanjung Balai (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021**

Tahun	Nias Utara	Nias Barat	Nias Selatan	Humbang Hasundutan	Pakpak Barat	Tanjung Balai
2017	12,500,000	8,200,000	75,541,198	15,212,701	9,335,245	32,035,000
2018	15,000,000	10,000,000	76,559,502	26,959,179	10,498,445	34,409,306
2019	30,000,000	20,000,000	50,640,920	27,752,527	14,960,679	5,940,728
2020	28,000,000	24,000,000	14,110,807	35,045,117	15,235,187	63,898,624
2021	32,004,000	28,740,000	14,160,411	41,679,311	24,297,176	65,315,422

*Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2021.*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 ke tahun 2018 ke enam Kabupaten/Kota secara signifikan mengalami peningkatan. Selanjutnya pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Nias Barat, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Utara dan Nias Selatan. Kemudian pada tahun 2021 ke enam Kota/Kabupaten sama-sama mengalami peningkatan.

Desentralisasi mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan kepada pengeluaran/Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan didaerah-daerah. Dalam era desentralisasi fiskal dengan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat dan kewenangan

yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi dan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan dan Pakpak Barat mengalami peningkatan, Kabupaten Nias Utara dan Kota Tanjung Balai mengalami penurunan.
2. Dana Perimbangan pada tahun 2021 Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai mengalami peningkatan, sedangkan Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan mengalami penurunan.
3. Pertumbuhan ekonomi di Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai tahun 2017 ke tahun 2018 dan 2021 mengalami peningkatan dan tahun 2019

---

<sup>10</sup>Suwandi, *Op. Cit.*, hlm. 186.



ke tahun 2020 Kabupaten Nias Utara dan Nias Selatan mengalami penurunan.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang dikaji perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian meliputi pembatasan terhadap objek penelitian dan subjek penelitian. Penulis membatasi masalah pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ ) dan Dana Perimbangan ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021 di 6 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

### **D. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Definisi operasional yang diukur memberikan gambaran bagaimana variabel tersebut diukur.<sup>11</sup> Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variabel-variabel terkait dalam penelitian.

---

<sup>11</sup> Moh. Nazir Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). hlm.126.

**Tabel I.5**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ )	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. <sup>12</sup>	1. Pajak Daerah. 2. Retribusi Daerah. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. <sup>13</sup>	Rasio
Dana Perimbangan ( $X_2$ )	Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. <sup>14</sup>	1. Dana Bagi Hasil. 2. Dana Alokasi Khusus. 3. Dana Alokasi Umum. <sup>15</sup>	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ )	Pertumbuhan ekonomi adalah upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan <i>output</i> , yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. <sup>16</sup>	1. Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional. 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat wilayah atau regional. <sup>17</sup>	Rasio

<sup>12</sup>Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019). hlm. 64.

<sup>13</sup>Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008). hlm. 63.

<sup>14</sup>Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004). hlm. 174.

<sup>15</sup>Priyarsono, *Op. Cit.*, hlm. 151.

<sup>16</sup>Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). hlm. 4.

<sup>17</sup>Eko Sudarmanto, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Yayasan Kita Menulis, 2021). hlm. 14.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021?

### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021.

## **G. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

### **1. Bagi Peneliti**

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021.

### **2. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengambil kebijakan dalam mengawasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan.

### **3. Bagi Dunia Akademik**

Penelitian diharapkan agar dapat menjadikan bahan referensi bacaan khususnya bagi Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan dan juga dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan dalam membaca.

### **4. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan dalam desentralisasi fiskal.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini terarah dan memudahkan peneliti dalam menyusunnya, maka sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, definisi operasional variabel, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Identifikasi masalah yaitu berisi uraian-uraian yang mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian serta pentingnya masalah diteliti dan dibahas. Batasan masalah yaitu peneliti membatasi masalah ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Rumusan masalah yaitu penjabaran hal-hal yang menjadi pernyataan yang akan dijawab oleh peneliti yang bersifat khusus mengenai masalah peneliti. Definisi operasional variabel yaitu menjelaskan secara operasional tentang setiap variabel yang akan diteliti oleh peneliti kemudian penjelasan definisi operasional variabel ini akan mengemukakan indikator-indikator variabel yang akan diteliti. Tujuan penelitian yaitu jawaban atas rumusan masalah yang dibuat dalam pernyataan. Manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini dapat dijelaskan dalam empat bentuk yakni manfaat bagi peneliti, manfaat bagi pemerintah dan manfaat bagi dunia akademik dan penelitian selanjutnya

## 2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi kerangka teori, kerangka pikir, penelitian terdahulu dan hipotesis. Kerangka teori adalah pembahasan dan uraian tentang objek penelitian sesuai dengan konsep atau teori yang diambil dari berbagai referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu adalah memuat beberapa penelitian dari orang lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kerangka pikir adalah memaparkan pemikiran peneliti tentang variabel atau masalah yang akan diteliti. Hipotesis adalah jawaban sementara dari hasil kerangka teori kemudian di uji kebenarannya melalui hasil analisis data.

## 3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data dan teknis analisis data. Lokasi dan waktu penelitian yaitu uraian yang menjelaskan tempat dilakukan penelitian dan rentang waktu pelaksanaan penelitian yang dimulai dari awal penulisan proposal hingga penulisan laporan penelitian terakhir. Jenis penelitian menjelaskan pendekatan yang dilakukan berupa penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel yaitu ada hubungannya dengan generalisasi. Untuk penelitian pustaka, pengumpulan data dan jenis pendekatan dengan menelaah buku-buku yang menjadi sumber data.

#### 4. Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian mengenai analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara 2017-2021.

#### 5. Bab V Penutup

Bab ini berisi penutup dari keseluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran. Kesimpulan memuat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang disimpulkan dari hasil penelitian Bab IV. Saran-saran yaitu memuat pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan objek penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pertumbuhan Ekonomi

###### a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat dapat bertambah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang, yang terpusat pada tiga aspek, yaitu proses, *output* per kapita dan jangka panjang, untuk menuju pada aspek dinamis dari suatu perekonomian.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada.<sup>2</sup>

Menurut Iskandar Putong, Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan *output* (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh

---

<sup>1</sup>Eko Sudarmanto, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 15-14.

<sup>2</sup>Darwis Harahap & Ferri Alfadri, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 159.



pertambahan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan.<sup>3</sup>

Menurut Wahyu Hidayat, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *output* total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dan laju pertumbuhan penduduk atau diikuti oleh perubahan struktur perekonomian atau tidak. Secara aritmetika sumber pertumbuhan dapat dibedakan menjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh barang modal, tenaga kerja dan perubahan produktivitas dari faktor produksi tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Syamsul Rijal, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan rata-rata dari *output* yang dihasilkan tiap orang dalam produksi barang dan jasa yang merupakan tingkat pertumbuhan per kapita secara riil bagi setiap orang. Dengan kenaikan ini maka diharapkan akan meningkatkan kapital, produksi dari tiap pekerja atau akan meningkatkan cadangan devisa. Selain itu pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan GDP riil pada tahun tertentu yang menunjukkan pendapatan perkapita.<sup>5</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah upaya peningkatan kapasitas

---

<sup>3</sup> Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 411.

<sup>4</sup> Wahyu Hidayat, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hlm. 3.

<sup>5</sup> Syamsul Rijal, *Kontribusi 20 Tahun Perdagangan Internasional Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, (Jawa Barat: CV. Widina Media Utama, 2022), hlm. 37.

produksi untuk mencapai penambahan *output* yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam satu wilayah. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya.

#### **b. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Proses pertumbuhan ekonomi menurut pertumbuhan ekonomi klasik dibedakan menjadi dua aspek yaitu pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk. Perhitungan *output* total dapat digunakan pada tiga variabel yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan persediaan *capital* atau modal. Sedangkan jika pada faktor kedua yaitu pertumbuhan penduduk, dilakukan dalam menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup> Ada lima faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:<sup>7</sup>

##### 1. Faktor Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia adalah aspek utama dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan bergantung pada sejauh mana sumber daya manusianya sebagai subjek pembangunan mempunyai kemampuan cukup dalam melakukan proses pembangunan.

---

<sup>6</sup> Eko Sudarmanto, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, *Op.cit.*, hlm. 15-16.

<sup>7</sup> Darwis Harahap & Ferri Alfadri, *Pengantar Ekonomi Makro*, *Op.cit.*, hlm. 164-166.

## 2. Faktor Sumber Daya Alam

Umumnya sumber daya alam merupakan tumpuan dari negara berkembang dalam menjalankan proses pembangunannya. Akan tetapi keberhasilan proses pembangunan tidak saja dipengaruhi oleh sumber daya manusianya untuk mengendalikan sumber daya alam yang ada.

## 3. Faktor Teknologi dan Ilmu Pengetahuan

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang mendukung terciptanya kelancaran pada proses pembangunan, perubahan sistem pekerjaan pada awalnya memanfaatkan tenaga manusia diganti dengan mesin-mesin canggih hal ini akan berdampak terhadap percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

## 4. Faktor Budaya

Aspek budaya dapat memberikan pengaruh khusus dalam pembangunan ekonomi yang dilaksanakan, aspek tersebut dapat berperan sebagai pendorong serta pembangkit proses pembangunan, namun bisa pula berperan sebagai penghambat pembangunan seperti hal-nya perilaku yang egois, boros, KKN dan anarkis.

## 5. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal diperlukan tenaga kerja dalam mengelola SDA serta menaikkan mutu IPTEK. Sumber daya modal seperti barang-barang modal amat berpengaruh untuk proses dan kecepatan pembangunan ekonomi sebab barang-barang modal pun bisa menaikkan produktivitas.

Berdasarkan kepada teori pertumbuhan ekonomi tersebut, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.<sup>8</sup>

### c. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Pertumbuhan ekonomi mempunyai peran yang sangat penting, sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Ekonomi Islam merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam ekonomi pembangunan, karena fokus

---

<sup>8</sup> Syamsul Rivai, *Peminat Ekonomi* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 38.

dan filosofi pertumbuhan ekonomi Islam memiliki perbedaan dalam hal paradigma yang melandasinya jika dibandingkan dengan ekonomi pembangunan secara umum.<sup>9</sup>

Dilihat dari pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monzer Kahf, menyatakan bahwa zakat dalam sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat.<sup>10</sup>

Sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan pendapatan dari kehidupan ekonomi yang didasarkan pada Al-Qur'an, dimana zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara parktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Perhitungan harta ditangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah al-Hasyar ayat 7,<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.1.

<sup>10</sup> Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Inasani, 2008), hlm. 14.

<sup>11</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Maktabah ar-Riyadh, 2007), hlm. 157.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.*

Sesuai dengan ayat diatas bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan dan pemerataan. Melalui zakat, sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yaitu memprioritaskan pemberantasan kemiskinan dan pengangguran, karena itu Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu, keduanya tidak boleh dipisahkan. Abdul Manan mempertegas bahwa tanggung jawab ekonomi Islam bukan hanya pembangunan dan pertumbuhan dibidang material saja, tetapi juga dari segi spritual dan moral. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan

ekonomi secara materail dan spritual, ekonomi Islam mempunyai karakteristik tersendiri dalam pertumbuhannya.<sup>12</sup>

## **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada

---

<sup>12</sup> Ika Yunia Fauziah & Abdul Kadir Riyadi, *Pertumbuhan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 11-12.

<sup>13</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018). hlm. 20.

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>14</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi karena PAD berfungsi sebagai salah satu komponen fiskal pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat daerah sehingga dapat memperlancar kegiatan ekonomi dan konsumsi yang dapat meningkatkan PDRB.<sup>15</sup>

#### **b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi: a) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; b) jasa giro; c) pendapatan bunga; d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.<sup>16</sup>

Sumber-sumber penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer (dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana otonomi) dapat meningkatkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 21.

<sup>15</sup> Guspika, dkk. *Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, 2019). hlm. 20.

<sup>16</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasion*. *Op.cit.* hlm. 22.



pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan/perubahan pendapatan atas jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun.<sup>17</sup>

Pendapatan asli daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.<sup>18</sup>

#### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tingkat I maupun pemerintah daerah Tingkat II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Pajak Daerah terdiri dari:

##### a) Pajak Provinsi

---

<sup>17</sup> Guspika, dkk. *Ekonomi Pembangunan, Op.cit.* hlm. 18.

<sup>18</sup> I Gede Putu Aryadi, dkk. *Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.* Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. hlm. 3-7.

Pajak provinsi adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur selaku kepala daerah Tingkat I sebagai bagian dari pendapatan Provinsi.

b) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku kepala daerah Tingkat II sebagai bagian dari pendapatan Kabupaten/Kota.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh PEMDA untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan objeknya, retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Retribusi Jasa Umum;
- b) Retribusi Jasa Usaha;
- c) Retribusi Perizinan Tertentu.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD tersebut, yang antara lain bersumber dari:

- a) Bagian laba dari perusahaan daerah;

- b) Bagian laba dari lembaga keuangan bank (contoh Bank Daerah);
  - c) Bagian laba atas penyerahan modal kepada badan usaha lainnya.
- 4) Lain-lain PAD yang sah

Selain jenis-jenis PAD diatas, pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain PAD yang sah, seperti:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b) Jasa giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan;
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **3. Dana Perimbangan**

#### **a. Pengertian Dana Perimbangan**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>19</sup>

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar-daerah secara proporsional, demokratis adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.<sup>20</sup>

Adapun tujuan dari dana perimbangan adalah:<sup>21</sup>

- 1) Dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
- 2) Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab, dan
- 3) Memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

---

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bab I Pasal 1 Ayat 1.

<sup>21</sup> Suwandi, *Desentralisasi Fiskal. Op,cit.*, hlm. 47-48.

## **b. Jenis Dana Perimbangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Pasal 2 Ayat 1 bahwa dana perimbangan terdiri dari:

- a) Dana Bagi Hasil;
- b) Dana Alokasi Umum, dan
- c) Dana Alokasi Khusus.

Dari ketiga jenis dana perimbangan yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### 1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan salah satu kesempatan bagi daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatannya. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prestasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber yang bersumber dari pajak terdiri atas:<sup>22</sup>

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan

---

<sup>22</sup> Yuswanto. *Resesain Hukum Perimbangan Keuangan Dari Dana Bagi Hasil Sektor Pajak*. (Bandar Lampung; Pusaka Media, 2021). hlm. 82-83.

- c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

- a) Kehutanan;
  - b) Pertambangan Umum;
  - c) Perikanan;
  - d) Pertambangan Minyak Bumi;
  - e) Pertambangan Gas Bumi; dan
  - f) Pertambangan Panas Bumi.
- 2) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN, diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan mengurangi kesenjangan keuangan di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>23</sup> Besaran dana alokasi umum paling sedikit harus mencakup 26% dari APBN. Dana Alokasi Umum dialokasikan 10% untuk daerah provinsi dan 90% untuk Kabupaten/Kota dan penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana yang bersifat umum untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan

---

<sup>23</sup> UU No. 33 Tahun 2004.

kemampuan keuangan antar daerah yang besarnya ditentukan sesuai dengan formulasi perhitungan Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan pengganti Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan bantuan atau disebut Dana Rutin Daerah (DRD) dan Dana Pembangunan Daerah (DPD).<sup>24</sup>

### 3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah memperhatikan otonomi daerah.<sup>25</sup>

Dana Alokasi Khusus (DAK) identik dengan *special grant* yang ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidental dan mempunyai fungsi yang sangat khusus, namun prosesnya tetap dari bawah (*bottom-up*). Dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan pemerintah.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Tinjauan Umum APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006. hlm. 11.

<sup>25</sup> Muhammad Idris Patarai, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Makassar: De La Macca, 2016), hlm. 200-202.

<sup>26</sup> Kusno Hadiutomo, *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi dan Terdesentralisasi* (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2021), hlm. 155.

#### 4. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan putusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak, dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.<sup>27</sup>

Gagasan dasar desentralisasi fiskal ialah penyerahan beban tugas pembangunan, penyediaan layanan publik dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga tugas-tugas itu akan lebih dekat ke masyarakat. Dengan begitu kemampuan pemerintah daerah akan dapat ditingkatkan dan pertanggungjawaban lebih terjamin.<sup>28</sup>

Berdasarkan UU No. 25/1999 mengenai pemerintah di daerah, secara khusus dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpuasan di antara provinsi-provinsi yang kaya dengan sumber daya alam. Undang-undang ini mengandung banyak unsur desentralisasi fiskal. Ditetapkan bahwa pendapatan pemerintah lokal terdiri dari Pendapatan Asli

---

<sup>27</sup> Roamery Elsy, *Desentralisasi Fiskal*. (Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2013). hlm. 25.

<sup>28</sup> Wahyudi Kumarotomo, *Desentralisasi Fiskal*. *Op,cit.*, hlm. 5-6.



Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.<sup>29</sup>

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan dampak negatif juga memungkinkan tindak korupsi karena memberikan peluang kepada Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuntungan potensi daerahnya. Bagi para pelaku korupsi di daerah, selain APBD, anggaran yang sering menjadi target korupsi adalah anggaran pemekaran daerah. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenanga tersebut.<sup>30</sup>

Desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum mengandung dua tujuan: untuk meningkatkan “demokrasi politik” dan sekaligus “demokrasi ekonomi”. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2001 untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Kebijakan desentralisasi akan berhasil jika aparat pemerintah daerah cukup terlambaga sehingga mampu menciptakan tata pemerintah yang demokratis.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>30</sup> Ganjar Pranowo, *Ekonomi Kelambagaan dan Desentralisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm, 73.

<sup>31</sup> Wahyudi Kumarotomo, *Desentralisasi Fiskal. Op,cit.* hlm. 272.

Indikator ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja/kemampuan keuangan pemerintahan daerah dan mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.<sup>32</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti melampirkan peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Irmal Suandi (Skripsi: Universitas Negeri Makassar, 2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesii Selatan	Pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
2.	Fadilah (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010- 2015	Pertumbuhan ekonomi dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi secara positif oleh pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan.
3.	Anita Sri Wahyuni (Jurnal: STEI	Pengaruh Pendapatan Asli	Pendapatan Asli Daerah dan alokasi umum secara parsial

<sup>32</sup> Mandala Harefa, dkk., *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 12.

	Ekonomi, Vol. XX, No. XX, 2020)	Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta	terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.
4.	Fanysa Eska Dyanti (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 33 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (EP). Sedangkan Desentralisasi Fiskal (DF), Jumlah Penduduk Miskin (JPM), Upah Minimum Regional (UMR) dan Investasi (INV) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).
5.	Ririn Anggreni (Skripsi: IAIN Parepare, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Parepare	Variabel dana Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Irmal Suandi sama-sama membahas pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya jenis variabelnya yaitu menggunakan variabel Dana Alokasi dan objek penelitiannya.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fadilah yaitu sama-sama membahas Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah variabelnya yang membahas tentang Belanja Modal, dan objek dari penelitian.

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anita Sri Wahyuni sama-sama membahas pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya jenis variabelnya yaitu menggunakan variabel Dana Alokasi Umum dan objek penelitiannya.
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fanysa Eska Dyanti sama-sama membahas analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Peneliti melakukan di Kota/Kabupaten yang mengalami pemekaran di Provinsi Sumatera Utara sedangkan penelitian Fanysa Eska Dyanti pada 33 Provinsi di Indonesia.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ririn Anggreni sama-sama membahas pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Sedangkan perbedaannya pada variabelnya dan objek penelitian.

### **C. Kerangka Pikir**

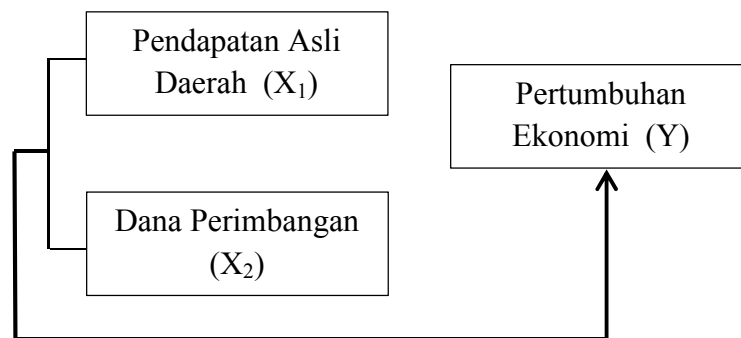
Kerangka pikir merupakan sebuah pernyataan yang berhubungan dengan adanya konsep dalam pemecahan masalah yang dapat dirumuskan. Kerangka pikir juga dapat diletakkan dalam kasus alami yang dapat diamati secara langsung oleh peneliti dan tidak dibatasi dengan adanya teori atau hipotesis.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Iwan Hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif dan mixed Method* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019) hlm. 126.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan yang menjadi modal diharapkan mampu mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif sehingga diharapkan bermanfaat dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar II.1**  
**Kerangka Pikir**



Berdasarkan kerangka pikir diatas menunjukkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>) adalah variabel bebas yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai variabel terikat. Secara parsial Dana Perimbangan (X<sub>2</sub>) adalah variabel bebas yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai variabel terikat. Dan secara simultan Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>), Dana Perimbangan (X<sub>2</sub>) mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (Y).

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

kalimat pertanyaan. Penggunaan hipotesis dalam penelitian karena hipotesis senguhnya baru sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan hipotesis penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian dilapangan baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data.

Hipotesis tersebut akan ditolak jika salah, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan, dimana hipotesis nol atau tidak berpengaruh dilambangkan dengan  $H_0$  dan hipotesis alternatif atau berpengaruh dilambangkan dengan  $H_a$ . Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

$H_{01}$  = Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021.

$H_{a1}$  = Tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021.

$H_{02}$  = Terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021.

$H_{a2}$  = Tidak terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021.

$H_0_3 =$  Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021.

$H_a_3 =$  Tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Sumatera Utara dengan pengambilan data yang bersumber dari laporan yang dipublikasikan melalui BPS Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2022 sampai bulan April 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah digunakan.<sup>1</sup>

#### **C. Populasi Dan Sampel**

Populasi adalah semua komponen yang dianggap memiliki satu atau lebih ciri yang sama, sehingga merupakan suatu kelompok yang menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian secara keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu.<sup>2</sup> Maka yang menjadi populasi dalam

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 35.

<sup>2</sup>Ketut Swarjana, *Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2022), hlm. 4.



penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017-2021.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih melalui beberapa proses dengan tujuan menyelidiki atau mempelajari sifat-sifat tertentu dari populasi.<sup>3</sup> Sampel yang diperlukan pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi 6 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 sampai 2021.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *teknik sampling*. *Teknik sampling* merupakan cara pengambilan sebagian dari populasi sedemikian rupa sehingga dapat menggeneralisasikan atau mewakili populasi. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu memilih anggota sampel dari populasi ditentukan oleh peneliti dengan menentukan beberapa kriteria,<sup>4</sup> yaitu sebagai berikut,

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Dana Perimbangan yang mengalami penurunan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>4</sup> Bagus Sumargo, *Teknik Sampling* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 19-20.

4. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan yang diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang mengalami penurunan.

**Tebel III.1**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara**  
**yang dijadikan Sampel Penelitian**

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Nias Utara
2.	Kabupaten Nias Barat
3.	Kabupaten Nias Selatan
4.	Kabupaten Humbang Hasundutan
5.	Kabupaten Pakpak Barat
6.	Kota Tanjung Balai

#### **D. Sumber Data**

Dalam usaha mencari kebenarannya, peneliti menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka secara sepintas lebih mudah untuk diketahui maupun untuk dibandingkan satu dengan yang lainnya. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historikal.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder dengan mengutip literasi dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian data-data dari instansi pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>5</sup> Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 119.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha mengumpulkan data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:<sup>6</sup>

### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga berbentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website.<sup>7</sup> Data ini bersifat tidak terbatas ruang dan waktu. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

### **2. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literature terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul

---

<sup>6</sup>Wiratna, Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2016) hlm.157.

<sup>7</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hlm. 231.

sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>8</sup>

## 2. Model Data Panel

Dalam model regresi menggunakan data panel, langkah pertama yang dilakukan adalah memilih model yang tepat. Regresi data panel memiliki tiga model. Pertama, *Common Effect Model (pooled least square)* dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Kedua, *Fixed Effect Model* dengan menambah variabel dummy pada data panel. Ketiga, *Random Effect Model* dengan menghitung error dari data panel menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*).<sup>9</sup>

### a. *Common Effect Model*

Teknik *Effect Model* menggabungkan seluruh data *time-series* dan *cross-section* tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu dan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) atau sering dikenal dengan pendekatan *Pooled Least Square*.

### b. *Fixed Effect Model*

Teknik *Effect Model* ini memungkinkan adanya perubahan pada setiap individu dan waktu dengan menambah variabel *dummy*. Istilah efek tetap muncul karena adanya intersep yang dapat berbeda antara individu, namun intersep setiap perubahan tidak bervariasi sepanjang waktu.

---

<sup>8</sup> Aloysius Rangga Adiyta Nalendra, dkk., *Statistik Seri Dasar dengan SPSS*, (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 4.

<sup>9</sup> Ansofino, dkk., *Ekonometrika*, (Jakarta: Deepublish, 2016), hlm. 20.

c. *Random Effect Model*

Teknik *Random Effect* menambah variabel gangguan (*error term*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

### 3. Pemilihan Data Panel

Pemilihan model estimasi yang tepat dilakukan dengan menggunakan tiga uji lainnya, yaitu Uji *Chow*, *Hausman Test* dan Uji LM.

a. Uji *Chow*

Uji pertama yang dilakukan dalam menentukan model estimasi terbaik adalah uji *Chow*. Uji ini dilakukan untuk membandingkan model *Common Effect* dengan *Fixed Effect*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_a = \text{Common Effect Model}$  yang sesuai

$H_0 = \text{Fixed Effect Model}$  yang paling sesuai

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *Chi-Square* hitung dengan *Chi-Square* tabel.

$Chi-Square_{hitung} > Chi-Square_{tabel} = \text{Hipotesis ditolak } (H_0)$

$Chi-Square_{hitung} < Chi-Square_{tabel} = \text{Hipotesis diterima } (H_a)$

b. *Hausman Test*

Uji selanjutnya dalam menentukan model estimasi terbaik adalah *Hausman Test*. Dalam uji ini model yang akan dibandingkan

adalah *Random Effect* dan *Fixed Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji adalah sebagai berikut:

$H_a = \text{Random Effect Model}$  yang paling sesuai

$H_0 = \text{Fixed Effect Model}$  yang paling sesuai

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *Chi-Square* hitung dengan *Chi-Square* tabel.

$\text{Chi-Square}_{\text{hitung}} > \text{Chi-Square}_{\text{tabel}} = \text{Hipotesis ditolak } (H_0)$

$\text{Chi-Square}_{\text{hitung}} < \text{Chi-Square}_{\text{tabel}} = \text{Hipotesis diterima } (H_a)$

c. Uji LM

Uji selanjutnya dalam menentukan model estimasi terbaik yang terakhir adalah uji LM (*Lagrange Multiplier*). Dalam uji ini model yang akan dibandingkan adalah *Common Effect* dan *Random Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

$H_a = \text{Common Effect Model}$  yang paling sesuai

$H_0 = \text{Random Effect Model}$  yang paling sesuai

#### 4. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila

signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.<sup>10</sup>

## 5. Uji Asumsi Klasik

### a) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan salah satu asumsi dalam penggunaan analisis regresi, berikut beberapa cara untuk mendeteksi masalah multikolinieritas,<sup>11</sup>

1. Nilai  $R^2$  yang dihasilkan dari hasil estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi tingkat signifikansi variabel bebas berdasarkan uji t statistic sangat kecil atau bahkan tidak ada variabel bebas yang signifikan. Jika  $R^2$  adalah tinggi di atas atau melebihi 0,80 maka uji F menolak hipotesis nol bahwa nilai koefisien slope (koefisien regresi untuk variabel bebas) parsial secara simultan sebenarnya sama dengan nol.
2. Nilai korelasi antar variabel bebas di atas atau melebihi 0,80.
3. Menggunakan pengujian korelasi parsial.

Pedoman yang digunakan untuk menentukan multikolinieritas antar variabel adalah dengan melihat nilai korelasi antar variabel bebas. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas  $> 0,80$  berarti terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

---

<sup>10</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 79.

<sup>11</sup> Sugiyono, *SPPSS dan Lisrel, Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 331-332.

Sebaliknya jika koefisien korelasi antar variabel bebas  $< 0,80$  maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

b) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

$H_0$  = Tidak terdapat autokorelasi

$H_a$  = Terdapat autokorelasi

Penelitian uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Bila  $(4-DW) \geq dU$  = Hipotesis diterima ( $H_a$ ), berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila  $(4-DW) \geq dL$  = Hipotesis ditolak ( $H_0$ ), berarti tidak ada autokorelasi.
3. Bila  $dL < (4-DW) < dU$  = Uji itu hasilnya tidak konklusif sehingga tidak dapat ditemukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak.

---

<sup>12</sup> Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 161.



## 6. Uji Hipotesis

### a) Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis yang digunakan dalam uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_{a1}$  = PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabuapten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

$H_{a2}$  = Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabuapten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

$H_{a3}$  = PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabuapten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

### b) Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_{01}$  = PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

$H_{02}$  = Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

$H_{03}$  = PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

c) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai yang digunakan dalam koefisien determinasi adalah dengan menggunakan nilai *Adjusted R Square*. Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari variasi total yang dapat diterangkan oleh model. Semakin besar  $R^2$  (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik. Jika  $R^2 = 0$ , berarti tidak ada hubungan antara X dan Y, atau model regresi yang terbentuk tidak tepat meramalkan Y. Jika  $R^2 = 1$ , garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan Y secara sempurna.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nawati, Analisis Regresi (Jakarta: PT. Alex Media, 2010), hlm. 29.

## 7. Uji Regresi Berganda

Regresi linier berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ ) dan Dana Perimbangan ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen (Y).

Dengan formulasi umum:

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DP_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$  = Koefisien Regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan

e = Residual/error

i = Tahun

t = Kabupaten/Kota

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara**

##### **1. Sejarah Umum Sumatera Utara**

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement Van Sumatera dengan wilayah meliputi seluruh Pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub Provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli.<sup>1</sup>

Dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2021* (Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021), hlm. 81.

<sup>2</sup> Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatera* (Jakarta: KITLV, 2011) hlm. 36.

## 2. Lokasi dan Keadaan Geografis

Provinsi Sumatera Utara berada dibagian barat Indonesia, terletak pada garis  $1^0-4^0$  Lintang Utara dan  $98^0-100^0$  Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain, disebelah Utara berbatasan dengan Aceh, disebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, disebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat dan disebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72,981,23 km<sup>2</sup>, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa Pulau, baik dibagian Barat maupun bagian Timur pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6,262,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6,134,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6,030,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,26 persen, sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km<sup>2</sup> sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.

### 3. Iklim

Provinsi Sumatera Utara tergolong kedalam daerah beriklim tropis karena terletak dekat garis khatulistiwa. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter diatas permukaan laut, beriklim cukup panas, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian.<sup>3</sup>

Sebagaimana Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kamarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Desember, diantara kedua musim ini terdapat musim pancaroba.

Sumatera Utara juga termasuk kedalam daerah yang sering mengalami kejadian gempa bumi sepanjang 2017 tercatat sebanyak 497 kali kejadian gempa bumi. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 dimana tercatat gempa bumi terjadi sebanyak 548 kali.<sup>4</sup>

## B. Gambaran Umum Variabel

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Untuk daerah yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nyata,

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2021* (Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021), hlm. 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 8

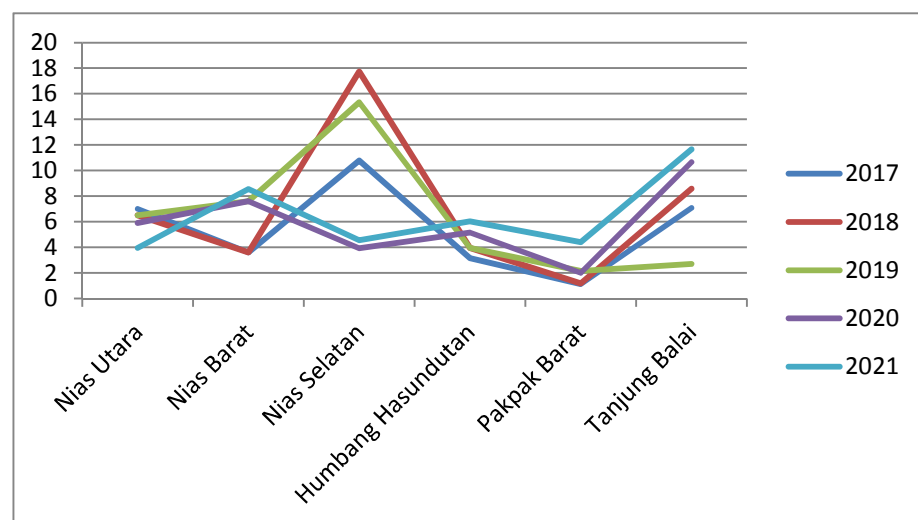
mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.<sup>5</sup>

**Tabel IV.1**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Miliar Rupiah)**

Tahun	Nias Utara	Nias Barat	Nias Selatan	Humbang Hasundutan	Pakpak Barat	Tanjung Balai
2017	7,000,000	3,600,000	10,794,743	3,167,028	1,134,706	7,083,418
2018	6,500,000	3,600,000	17,748,994	3,961,715	1,186,534	8,583,418
2019	6,500,000	7,594,400	15,330,442	3,961,715	2,144,273	2,708,466
2020	5,900,000	7,594,400	3,932,834	5,159,233	1,998,842	10,658,500
2021	3,945,000	8,562,900	4,542,498	6,029,770	4,391,000	11,658,500

Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2021.

**Gambar IV.1**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Juta Rupiah)**



Sumber: BPS Sumatera Utara data diolah 2021.

<sup>5</sup> Irma Yulia, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 64.

Berdasarkan tabel IV.1 dan gambar IV.1 diatas, terlihat bahwa pendapatan asli daerah pada tahun 2017 ke tahun 2018 yang mengalami peningkatan adalah kabupaten Nias Utara, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang memiliki nilai tetap adalah Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya pendapatan asli daerah pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang mengalami peningkatan adalah kabupaten Humbang Hasundutan dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang memiliki nilai tetap adalah Kabupaten Nias Barat dan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Utara, Nias Selatan dan Pakpak Barat. Kemudian pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan dan Pakpak Barat, sedangkan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Utara dan Kota Tanjung Balai.

## **2. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 174.

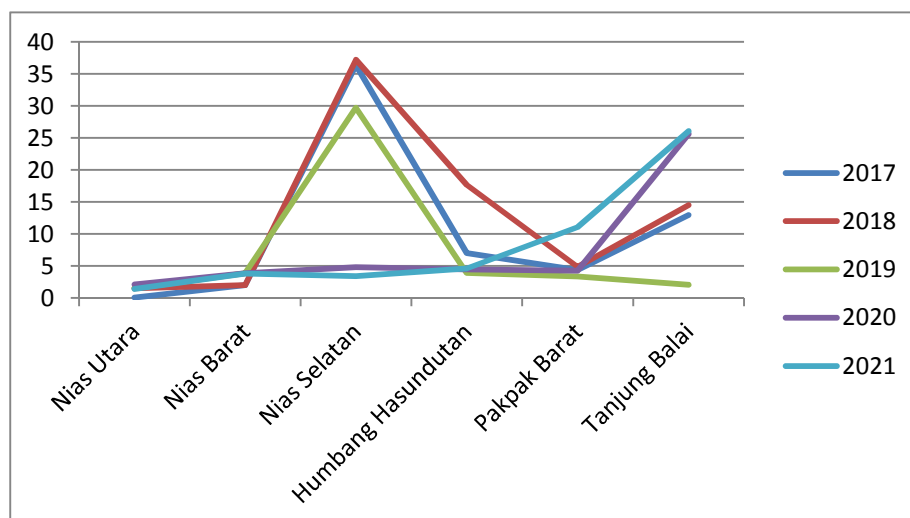


**Tabel IV.2**  
**Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Miliar Rupiah)**

Tahun	Nias Utara	Nias Barat	Nias Selatan	Humban Hasundutan	Pakpak Barat	Tanjung Balai
2017	5,000,000	2,000,000	36,319,166	6,974,502	4,352,064	12,915,852
2018	1,500,000	2,000,000	37,203,232	17,640,162	4,816,911	14,488,537
2019	1,500,000	3,829,500	29,686,215	3,863,511	3,345,872	2,033,736
2020	2,100,000	3,829,500	4,785,675	4,458,583	4,247,300	25,601,771
2021	1,360,000	3,796,000	3,389,889	4,573,173	1,046,720	26,018,569

Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2021.

**Gambar IV.2**  
**Dana Perimbangan Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Juta Rupiah)**



Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2021.

Berdasarkan tabel IV.2 dan gambar IV.2 diatas terlihat bahwa dana perimbangan pada tahun 2017 ke tahun 2018 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Nias Utara, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang memiliki nilai tetap adalah Kabupetan Nias Barat. Selanjutnya tahun

2019 ke tahun 2020 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Nias Barat, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang memiliki nilai tetap adalah Kabupaten Nias Barat dan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Selatan. Kemudian pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan rata-rata dari *output* yang dihasilkan tiap orang dalam produksi barang dan jasa yang merupakan tingkat pertumbuhan per kapita secara riil bagi setiap orang. Dengan kenaikan ini maka diharapkan akan meningkatkan kapital, produksi dari tiap pekerja atau akan meningkatkan cadangan devisa. Selain itu pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan GDP riil pada tahun tertentu yang menunjukkan pendapatan per kapita.<sup>7</sup> Bohte dan Meier mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan tinggi terjadi pada pemerintahan yang terdesentralisasi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Syamsu Rijal, *Kontribusi 20 Tahun Perdagangan Internasional Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. (Jawa Barat: CV. Widina Media Utama, 2022) hlm. 37.

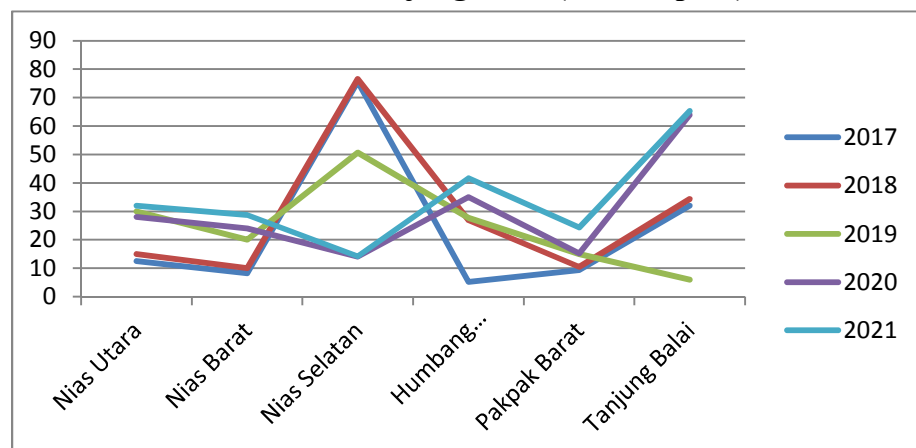
<sup>8</sup> Suwandi, *Desentralisasi Fiskal*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), hlm. 74.

**Tabel IV.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Juta Rupiah)**

Tahun	Nias Utara	Nias Barat	Nias Selatan	Humbang Hasundutan	Pakpak Barat	Tanjung Balai
2017	12,500,000	8,200,000	75,541,198	15,212,701	9,335,245	32,035,000
2018	15,000,000	10,000,000	76,559,502	26,959,179	10,498,445	34,409,306
2019	30,000,000	20,000,000	50,640,920	27,752,527	14,960,679	5,940,728
2020	28,000,000	24,000,000	14,110,807	35,045,117	15,235,187	63,898,624
2021	32,004,000	28,740,000	14,160,411	41,679,311	24,297,176	65,315,422

Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2021

**Gambar IV.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai (Juta Rupiah)**



Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah 2021.

Berdasarkan tabel IV.3 dan gambar IV.3 diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 ke tahun 2018 ke enam Kabupaten/Kota sama-sama mengalami peningkatan. Selanjutnya pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Nias Barat, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai, sedangkan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Nias Utara dan Nias Selatan. Kemudian pada tahun 2021 ke enam Kabupaten/Kota sama-sama mengalami peningkatan.

## C. Hasil Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif

Hasil uji model data panel yang telah diolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV. 4**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	30	1134706	17748994	6231844,30	3946779,722
DP	29	500000	37203232	9530360,00	10946946,869
PE	29	5940728	76559502	31450870,28	21388023,456
Valid N	28				

*Sumber: Hasil Output IMB SPSS Statistics 23.*

Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif diatas Hasil uji diatas menunjukkan jumlah (N) ada 28, dari 28 ini nilai minimum adalah 500000, dan nilai maximum adalah 37203232, dan nilai mean 6231844,30 dengan std. deviation sebesar 3946779,722.

### 2. Model Data Panel

Hasil uji model data panel yang telah diolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV. 5**  
**Hasil Uji Model Data Panel**

Model	Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
Commont Effect	PAD	6991017.	3165712.	2.208356	.0359
	DP	1.913441	0.662424	2.888544	.0075
	PE	1.051265	0.241855	4.346681	.0002
Fixed Effect	PAD	5089898.	3962350.	1.284566	.2123
	DP	2.015039	0.926758	2.174290	.0407
	PE	1.187027	0.350265	3.388942	.0026
Random Effect	PAD	6408400.	3613511.	1.773455	.0874
	DP	1.954643	0.729332	2.680046	.0124
	PE	1.086153	0.268949	4.038513	.0004

*Sumber: Hasil Output IMB SPSS Statistics 23.*

Setelah melakukan uji diatas, selanjutnya dipilih model data panel yang tepat. Pemilihan model uji data panel yang dapat dilakukan dengan menggunakan tiga uji lainnya, yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM. Dari ketiga uji pemilihan data panel yang telah dilakukan maka uji yang terpilih adalah Uji Chow.

Berikut ini hasil uji chow yang telah diolah adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 6**  
**Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Test  
Equation Untitled  
Test cross-section fixed effects

<b>Effects Test</b>	<b>Statisticts</b>	<b>d.f.</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section F	1.351052	(5.22)	0.2805
Cross-section Chi-square	8.033348	5	0.1544

*Sumber: Hasil Output IMB SPSS Statistics 23.*

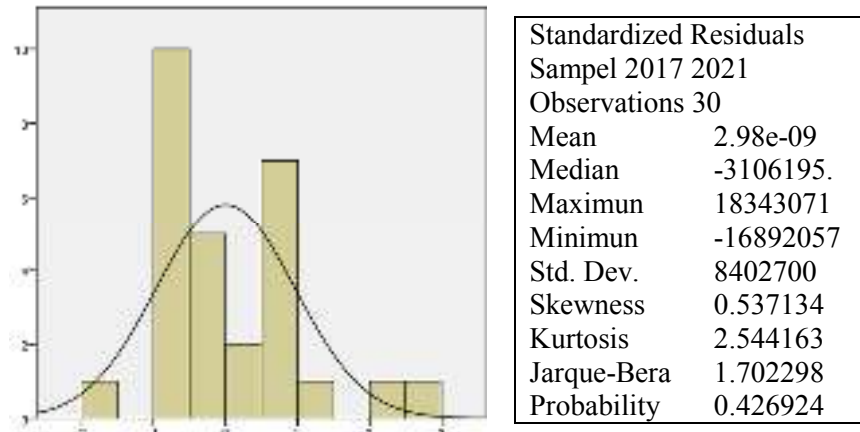
Berdasarkan uji chow diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Chi-square* yang diperoleh adalah 8.033348 lebih kecil dari nilai *Chi-square* tabel 11.070 sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis diterima ( $H_a$ ) dan hasil dari uji ini menyatakan bahwa model yang paling sesuai antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* adalah *Common Effect*.

Setelah dilakukan uji pemilihan data panel ini menyatakan bahwa dari hasil Uji ini menunjukkan dari ketiga uji yang telah dilakukan model estimasi yang paling sesuai adalah *common effect*.

### 3. Uji Normalitas

Berikut ini hasil uji normalitas yang telah diolah adalah sebagai berikut:

**Gambar IV. 4**  
**Uji Normalitas**



Sumber: Hasil Output IMB SPSS Statistics 23.

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat dilihat pada tabel diatas nilai *probability* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,426924, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

### 5. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik yang telah diolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

#### a. Uji Multikolinearitas

Berikut ini hasil uji multikolinearitas yang telah diolah adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

	PAD	DP
PAD	1	0.7856474007245576
DP	0.7856474007245576	1

Sumber: Hasil Output IMB SPSS Statistics 23.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena koefisien korelasi antar variabel independen masih dibawah syarat adanya multikolinearitas. PAD dan Dana Perimbangan mempunyai korelasi sebesar 0.7856474007245576, sehingga adapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

b. Uji Autokorelasi

Berikut ini hasil uji autokorelasi yang telah diolah adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 8**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.819644	Mean dependent var	28734416
Adjusted R-square	0.806284	S.D. dependent var	19785780
S.E. of regression	8708352.	Akaike info criterion	34.89210
Sum square resid	2.05E+15	Schwarz criterion	35.03222
Log Likelihood	-520.3815	Hannan-Quinn criter	34.93693
F-statistic	61.35184	Durbin-Watson stat	0.859414
Prob (F-statistic)	0.000000		

*Sumber: Hasil Output IMB SPSS Statistics 23.*

Berdasarkan hasil uji diatas diperoleh nilai DW sebesar 0,859414, sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0.05 (5%) dan jumlah data (n) = 30 dan jumlah variabel (k) = 3 diperoleh nilai dL sebesar 1,2138 dan dU sebesar 1,6498. Dimana (4-DW) diperoleh hasil 3,140586 lebih besar dari dU = 1,6498 sehingga  $H_0$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

## 6. Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis yang telah diolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

### a. Uji t

Berikut ini hasil uji t (parsial) yang telah diolah adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 9**  
**Hasil Uji t**

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	2.208356	0.0359
PAD	2.888544	0.0075
DP	4.346681	0.0002

*Sumber: Hasil Output IMB SPSS Statistics 23.*

Bersadarkan hasil uji hipotesis diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil uji t diatas diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,88544 dan nilai  $t_{tabel}$  1,70329 berdasarkan pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $2,885 > 1,70329$  sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD diterima.
- 2) Hasil uji t diatas diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 4,346681 dan nilai  $t_{tabel}$  1,70329 berdasarkan pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $4,346681 > 1,70329$  sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan diterima.



## b. Uji F

Berikut ini hasil uji F (simultan) yang telah diolah adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 10**  
**Hasil Uji f**

F-statistic	61.35184	Durbin-Watson stat	0.859414
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Output IMB SPSS Statistics 23.

Diketahui nilai  $f_{hitung}$  adalah sebesar 61,35184 nilai ini lebih kecil dari nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,35 yaitu  $61,35184 > 3,35$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berikut ini hasil uji determinasi ( $R^2$ ) yang telah diolah adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R-squared	0.819644	Mean dependent var	28734416
Adjusted R-square	0.806284	S.D. dependent var	19785780
S.E. of regression	8708352.	Akaike info criterion	34.89210
Sum square resid	2.05E+15	Schwarz criterion	35.03222
Log Likelihood	-520.3815	Hannan-Quinn criter	34.93693
F-statistic	61.35184	Durbin-Watson stat	0.859414
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Output IMB SPSS Statistics 23.

Diketahui nilai koefisien determinasi atau *R Square* diperoleh sebesar 0,819644, hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel PAD dan Dana Perimbangan mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 81,9 persen. Sedangkan sisanya 18,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## 7. Uji Regresi Berganda

Hasil uji regresi berganda yang telah diolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV. 12**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**

Dependent Variabel: Pertumbuhan Ekonomi  
Method: Panel Least Squares  
Samoel: 2017 2021  
Periods Included: 5  
Cross-sections include: 6  
Total Panel (Balance) Observations: 30

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6991017.	3165712	2.208356	0.0359
PAD	1.913441	0.662424	2.888544	0.0075
Dana Perimbangan	1.051265	0.241855	4.346681	0.0002
R-squared	0.819644	Mean dependent var		28734416
Adjusted R-squared	0.806284	S.D. dependent var		19785780
S.E. of Regression	8708352.	Akaike info criterion		34.89210
Sum squared resid	2.05E+15	Schwarz criterion		35.03222
LLog likelihood	-520.3815	Hannan-Quinn criter		34.93693
F-statistic	61.35184	Durbin-Waston stat		0.859414
Prob (F.statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Output IMB SPSS Statistics 23.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DP_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan persamaan diatas, maka diperoleh model regresi secara umum sebagai berikut:

$$PE = 6,991,017 + 1,913441PAD_{it} + 1,051265DP_{it} + 3167512_{it}$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 6,991,017 artinya jika PAD ( $X_1$ ) dan dana perimbangan ( $X_2$ ) nilainya 0, maka pertumbuhan ekonomi (Y) nilainya 6,991,017.

- b. Koefisien PAD sebesar 1,913441 menunjukkan bahwa apabila PAD meningkat 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 1,913,441 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara PAD dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Koefisien dana perimbangan sebesar 1,051265 menunjukkan bahwa apabila dana perimbangan meningkat 1 persen, maka dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 1,051,265 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi.
- d. Koefisien PAD dan dana perimbangan secara simultan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nilai  $f_{hitung}$  sebesar 61,35184 lebih kecil dari  $F_{tabel}$  sebesar 3,32.

## 5. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang terdesentralisasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021. Dari ketiga hasil uji *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi *Common Effect*. Ketiga hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dua

hasil uji menyatakan model estimasi *Common Effect* yang paling sesuai.

Hasil dari penelitian ini sebagaimana telah dicantumkan diatas, menunjukkan bahwa hasil dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,819644 hal ini berarti variansi variabel pertumbuhan ekonomi secara simultan dapat dijelaskan oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebesar 81,9 persen sedangkan sisanya 18,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Selanjutnya hasil interpretasi dari hasil regresi tersebut terhadap signifikansi masing-masing variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut,

**a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil uji t pada tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,88544 dan nilai  $t_{tabel}$  yang diperoleh sebesar 1,70329. berdasarkan pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $2,88544 > 1,70329$ .

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah itu tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap masyarakat secara

berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Rizka Djayanthi yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Provinsi DKI Jakarta.” Berdasarkan hasil penelitian, teori yang ada dalam penelitian tersebut bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi DKI Jakarta.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah searah dan positif artinya semakin tinggi jumlah pendapatan asli daerah maka semakin besar peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

#### **b. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil uji t pada tingkat signifikansi 0,05 sebesar 4,346681 dan nilai  $t_{tabel}$  1,70329, berdasarkan pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $4,346681 > 1,70329$ .

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Rizka Djyanthi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Provinsi DKI Jakarta”. Berdasarkan hasil penelitian, teori yang ada dalam penelitian tersebut bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi DKI Jakarta.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini dana perimbangan searah dan positif artinya semakin tinggi jumlah dana perimbangan maka semakin besar peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

#### **c. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil uji  $f$  yang telah dilakukan diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 61,35184 lebih kecil dari nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,35. Maka sesuai

dengan dasar dasar pengambilan keputusan dalam uji f dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Sumber-sumber penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Rizka Djyanthi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Provinsi DKI Jakarta”. Berdasarkan hasil penelitian, teori yang ada dalam penelitian tersebut bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi DKI Jakarta.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat dan Kota Tanjung Balai.

## **6. Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan penulisan skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan, agar menghasilkan penelitian yang sebaik mungkin, namun untuk memperoleh penelitian yang sempurna tidaklah mudah.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Variabel bebas yang digunakan hanya dua, sehingga kurang maksimal dalam menjelaskan variabel terikat.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 33 sampel.
3. Periode penelitian yang digunakan hanya 5 tahun pengamatan yaitu tahun 2017 sampai tahun 2021.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Dan secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dan dari kesimpulan yang didapat, maka beberapa saran diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Sumatera Utara diharapkan dalam mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

berorientasi pada pendapatan perkapita dan lebih bisa berkontribusi langsung pada semua lapisan masyarakat.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdesentralisasi di Provinsi Sumatera Utara harus dapat memaksimalkan peranan desentralisasi fiskal untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing.
3. Pemerintah baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai yang dapat menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Sehingga bagi daerah yang tertinggal akan dapat dengan mengakses kegiatan ekonomi seperti daerah yang maju sehingga pertumbuhan ekonomi dapat secara merata terjadi di setiap Kabupaten/Kota.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi. Dan apabila peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang masalah ini dapat diharapkan menambah jumlah variabel penelitian agar dapat memberikan hasil analisis yang lebih rill.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku:

- Adisasmita, Rahardjo. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Aryadi I Gede. Putu, dkk. *Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. & Solihin, Dadang. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Elsye, Roamery. *Desentralisasi Fiskal*. Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2013.
- Fauziah, Ika Yunia. & Riyadi Abdul Kadir. *Pertumbuhan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Firdausy, Carunia Mulya. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Guspika., dkk. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, 2019.
- Hadiutomo, Kusno. *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi dan Terdesentralisasi*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2021.
- Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Inasani, 2008.
- Harefa, Mandala. dkk., *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Hermawan, Iwan. *Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif dan mixed Method*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Kumarotomo, Wahyudi. *Desentralisasi Fiskal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Latumaerissa, Julius R. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Ekonomi Global*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Nazir, Moh. Ph.D. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Patarai, Muhammad Idris. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Makassar: De La Macca, 2016.
- Pranowo, Ganjar. *Ekonomi Kelambagaan dan Desentralisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

- Priyarsono. *Analisis Pembangunan dalam Prespektif Ekonomi Regional*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2011.
- Reid, Anthony. *Menuju Sejarah Sumatera*, Jakarta: KITLV, 2011.
- Rijal, Syamsul. *Kontribusi 20 Tahun Perdagangan Internasional Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jawa Barat: CV. Widina Media Utama, 2022.
- Rivai, Syamsul. *Peminat Ekonomi*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Sudarmanto, Eko. dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sugianto. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia, 2008.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penilitin Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2016.
- Sumargo, Bagus. *Teknik Sampling*, Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.
- Suwandi. *Desentralisasi Fiskal*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Swarjana, Ketut. *Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, 2022.
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Yulia, Irma. *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Yuswanto. *Resesain Hukum Perimbangan Keuangan Dari Dana Bagi Hasil Sektor Pajak*. Bandar Lampung; Pusaka Media, 2021.

#### **Sumber Jurnal:**

- Abiding, Zainal. "Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomu Islam atas Sistem Ekonomi Konvensioanl)." *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2 Desember 2012.
- Adriansyah, Yuli. "Menuju Desentralisasi Kebijakan Ekonomi Dalam Islam Pengamalan Dinasti 'Usmaniyyah Abad 16-18 M dan Indonesia Dimasa Orde Baru". *Jurnal Al-Amwal* Vol. 9 No. 1, 2017.

- Chandara, Dodi. "Dampak Dana Perimbangan Terhadap pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi." *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Gunawan. Moch Hoerul. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Dalam Jurnal Takhim*, Vol. XVI, No. 1, 2020.
- Muttaqin, Rizal. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Prespektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 November 2018.
- Pratiwi, Adellia. "Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur" dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021.
- Pratiwi, Adellia., et. Al., "Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur" dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021.
- Triyanto. "Implikasi Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Terhadap Beban Fiskal dan Kebijakan Alokasi DAU", *Jurnal Defis* Edisi I, Volume 1, Juli-Desember 2017.

### **Undang-undang**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bab I Pasal 1 Ayat 1.
- UU No. 33 Tahun 2004.

### **Website:**

- Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2021*, Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021.
- Tinjauan Umum APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006.

**Tabel 10.1.6**      **Anggara Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota**  
**Table**                      **Menurut Jenis Pendapapatan (Miliar-Rupiah), 2017**  
   **Plan Regency/City Local Government Original Receipt By**  
   **Types Of Receipt (Billion-Rupiahs), 2017**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government</i>	Dana Perimbangan <i>Balancing fund</i>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daeah yang Dipisahkan <i>Output Of</i> <i>Management of</i> <i>Separated Regional</i> <i>Government Wealth</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kabupaten/Regency</b>			
1. Nias	2 278 000	19 754 790	5 500 000
2. Mandailing Natal	19 578 000	10 772 000	10 000 000
3. Tapanuli Selatan	6 705 480	7 772 441	43 240 000
4. Tapanuli Tengah	6 234 433	5 100 241	8 577 550
5. Tapanuli Utara	3 759 126	20 704 361	6 515 000
6. Toba Samosir	4 623 808	8 578 730	2 640 030
7. Labuhanbatu	21 369 600	26 684 959	12 000 000
8. Asahan	25 778 525	9 086 647	6 625 788
9. Simalungun	30 757 095	15 296 899	13 034 500
10. Dairi	4 020 000	21 922 705	4 600 000
11. Karo	18 775 550	23 290 218	3 250 000
12. Deli Serdang	364 720 000	80 198 000	14 700 000
13. Langkat	28 143 300	22 649 755	5 200 000
14. Nias Selatan	10 794 743	36 219 166	2 755 458
15. Humbang Hasundutan	3 167 028	6 974 502	2 612 589
16. Pakpak Barat	1 134 706	4 352 064	1 200 000
17. Samosir	4 360 000	10 804 368	1 556 240
18. Serdang Bedagai	27 220 000	20 540 033	-
19. Batu Bara	15 338 743	6 023 700	-
20. Padang Lawas Utara	3 779 194	8 047 250	-
21. Padang Lawas	11 177 516	9 360 761	3 591 395
22. Labuhanbatu Selatan	14 560 500	8 259 650	-
23. Labuhanbatu Utara	12 441 000	7 631 440	-
24. Nias Utara	7 000 000	500 000	-
25. Nias Barat	3 600 000	2 000 000	-
<b>Kota/City</b>			
26. Sibolga	6 112 607	16 288 178	5 200 000
27. Tanjungbalai	7 083 418	12 915 582	4 900 000
28. Pematangsiantar	30 381 827	25 884 690	9 500 000
29. Tebing Tinggi	9 495 000	5 343 620	5 000 000
30. Medan	1 189 999 280	326 623 000	20 491 162
31. Binjai	24 424 358	13 515 268	2 800 000
32. Padanngsidimpunan	9 935 000	22 485 400	6 410 000
33. Gunungsitoli	8 513 250	3 500 000	-
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 937 261 087</b>	<b>819 180 418</b>	<b>201 899 721</b>

**KEUANGAN DAN HARGA-HARGA**  
**FINANCE AND PRICES**

**Lanjutan Tabel/Continued Table 10.1.6**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Lain-lain PAD yang sah <i>Others Receipt</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)
<b>Kabupaten/Regency</b>		
1. Nias	3 000 000	30 532 790
2. Mandailing Natal	6 650 000	47 000 000
3. Tapanuli Selatan	6 368 892	64 086 813
4. Tapanuli Tengah	6 747 587	26 659 811
5. Tapanuli Utara	5 159 867	36 138 354
6. Toba Samosir	3 146 000	19 006 568
7. Labuhanbatu	6 501 983	66 556 542
8. Asahan	12 547 360	54 038 320
9. Simalungun	4 650 000	63 738 494
10. Dairi	12 547 360	37 322 705
11. Karo	4 650 00	48 165 768
12. Deli Serdang	6 780 000	465 000 000
13. Langkat	2 850 000	68 971 555
14. Nias Selatan	5 382 000	75 541 198
15. Humbang Hasundutan	12 978 500	15 212 701
16. Pakpak Barat	25 671 831	9 335 245
17. Samosir	2 458 582	20 008 108
18. Serdang Bedagai	3 287 500	53 784 914
19. Batu Bara	14 000 000	35 362 443
20. Padang Lawas Utara	3 671 250	15 497 694
21. Padang Lawas	1 775 237	25 904 910
22. Labuhanbatu Selatan	107 468 011	130 288 161
23. Labuhanbatu Utara	3 135 000	23 207 440
24. Nias Utara	5 000 000	12 500 000
25. Nias Barat	2 600 000	8 200 000
<b>Kota/City</b>		
26. Sibolga	2 986 000	30 586 785
27. Tanjungbalai	7 136 000	32 035 000
28. Pematangsiantar	5 845 000	71 611 517
29. Tebing Tinggi	16 434 300	36 272 920
30. Medan	221 674 393	1 758 787 835
31. Binjai	5 400 000	46 139 626
32. Padanngsidimpuan	3 350 000	42 180 400
33. Gunungsitoli	4 986 750	17 000 000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>528 333 399</b>	<b>3 486 674 617</b>

Sumber/Source: BPS Provinsi Sumatera Utara/BPS-Statistic of Sumatera Utara Province

**Tabel 10.1.6**      **Anggara Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota**  
**Table**                      **Menurut Jenis Pendapapatan (Miliar-Rupiah), 2018**  
   **Plan Regency/City Local Government Original Receipt By**  
   **Types Of Receipt (Billion-Rupiahs), 2018**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government</i>	Dana Perimbangan <i>Balancing fund</i>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daeah yang Dipisahkan <i>Output Of Management of Separated Regional Government Wealth</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kabupaten/Regency</b>			
1. Nias	3 443 000	32 200 375	6 000 000
2. Mandailing Natal	20 128 000	12 852 000	10 000 000
3. Tapanuli Selatan	11 419 000	8 472 453	43 561 387
4. Tapanuli Tengah	11 462 429	5 454 891	7 726 618
5. Tapanuli Utara	4 366 126	20 816 606	6 605 000
6. Toba Samosir	6 225 683	10 704 016	3 065 000
7. Labuhanbatu	29 059 600	37 788 863	11 000 000
8. Asahan	28 168 310	6 495 281	6 625 788
9. Simalungun	33 132 095	15 583 521	52 834 384
10. Dairi	7 226 000	7 495 000	6 260 000
11. Karo	28 023 050	23 572 528	2 800 000
12. Deli Serdang	418 680 000	126 485 450	15 000 000
13. Langkat	37 897 000	60 917 664	5 200 000
14. Nias Selatan	17 748 994	37 203 232	2 300 000
15. Humbang Hasundutan	3 961 715	17 640 162	2 612 000
16. Pakpak Barat	1 186 534	4 816 911	1 200 000
17. Samosir	4 810 000	13 813 379	1 650 000
18. Serdang Bedagai	28 167 000	24 631 900	-
19. Batu Bara	20 884 777	3 063 500	-
20. Padang Lawas Utara	4 885 931	16 614 311	-
21. Padang Lawas	11 070 688	13 479 435	4 150 000
22. Labuhanbatu Selatan	15 204 204	11 676 094	-
23. Labuhanbatu Utara	13 676 500	11 735 842	-
24. Nias Utara	6 500 000	1 500 000	-
25. Nias Barat	3 600 000	2 000 000	-
<b>Kota/City</b>			
26. Sibolga	6 503 850	20 294 165	6 200 000
27. Tanjungbalai	8 583 418	14 488 537	5 400 000
28. Pematangsiantar	30 781 827	9 307 510	7 706 219
29. Tebing Tinggi	14 745 000	9 307 510	5 000 000
30. Medan	1 167 399 280	174 670 370	10 096 297
31. Binjai	30 244 934	24 663 056	2 800 000
32. Padanngsidimpunan	11 885 000	20 895 400	6 326 000
33. Gunungsitoli	9 513 250	10 900 000	-
<b>Jumlah/Total</b>	<b>2 050 583 195</b>	<b>814 891 042</b>	<b>232 119 355</b>



**KEUANGAN DAN HARGA-HARGA**  
**FINANCE AND PRICES**

**Lanjutan Tabel/Continued Table 10.1.6**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Lain-lain PAD yang sah <i>Others Receipt</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)
<b>Kabupaten/Regency</b>		
1. Nias	2 998 500	44 641 875
2. Mandailing Natal	7 020 000	50 000 000
3. Tapanuli Selatan	13 800 000	77 252 840
4. Tapanuli Tengah	7 803 253	32 447 191
5. Tapanuli Utara	5 203 130	36 990 862
6. Toba Samosir	3 413 875	23 408 574
7. Labuhanbatu	7 501 983	85 350 446
8. Asahan	17 840 393	59 129 772
9. Simalungun	8 450 000	110 000 000
10. Dairi	3 350 000	24 331 000
11. Karo	12 948 000	67 343 578
12. Deli Serdang	6 500 000	566 665 450
13. Langkat	10 853 500	114 868 164
14. Nias Selatan	19 307 276	76 559 502
15. Humbang Hasundutan	2 744 712	26 959 179
16. Pakpak Barat	3 295 000	10 498 445
17. Samosir	3 500 000	23 773 379
18. Serdang Bedagai	8 205 394	61 004 294
19. Batu Bara	5 500 000	29 448 277
20. Padang Lawas Utara	2 236 120	23 736 362
21. Padang Lawas	5 550 495	34 250 618
22. Labuhanbatu Selatan	8 755 000	35 635 298
23. Labuhanbatu Utara	3 135 000	28 547 324
24. Nias Utara	7 000 000	15 000 000
25. Nias Barat	4 400 000	10 000 000
<b>Kota/City</b>		
26. Sibolga	3 218 000	36 216 015
27. Tanjungbalai	5 937 351	34 409 306
28. Pematangsiantar	5 660 000	57 806 708
29. Tebing Tinggi	18 424 826	47 477 338
30. Medan	163 520 000	1 515 685 947
31. Binjai	11 000 000	68 707 990
32. Padanngsidimpuan	3 350 000	42 456 400
33. Gunungsitoli	7 986 750	28 400 000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>401 408 558</b>	<b>3 499 002 150</b>

Sumber/Source: BPS Provinsi Sumatera Utara/BPS-Statistic of Sumatera Utara Province



**KEUANGAN DAN HARGA-HARGA**  
**FINANCE AND PRICES**

**Lanjutan Tabel/Continued Table 10.1.6**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Lain-lain PAD yang sah <i>Others Receipt</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)
<b>Kabupaten/Regency</b>		
1. Nias	46 856 500	63 227 700
2. Mandailing Natal	20 538 498	65 720 595
3. Tapanuli Selatan	18 730 395	98 438 746
4. Tapanuli Tengah	24 582 916	47 720 445
5. Tapanuli Utara	7 649 057	50 000 000
6. Toba Samosir	14 292 560	34 197 875
7. Labuhanbatu	19 849 115	146 290 701
8. Asahan	28 354 586	71 255 889
9. Simalungun	5 850 000	112 414 289
10. Dairi	13 687 755	60 481 900
11. Karo	3 100 000	53 557 219
12. Deli Serdang	33 744 445	630 720 102
13. Langkat	46 652 872	110 900 351
14. Nias Selatan	3 100 000	50 640 920
15. Humbang Hasundutan	17 314 712	27 752 527
16. Pakpak Barat	7 870 535	14 960 679
17. Samosir	9 618 562	26 595 698
18. Serdang Bedagai	7 668 756	72 418 621
19. Batu Bara	14 125 398	43 361 398
20. Padang Lawas Utara	3 144 420	26 315 846
21. Padang Lawas	22 640 946	40 117 300
22. Labuhanbatu Selatan	14 640 946	39 900 150
23. Labuhanbatu Utara	10 896 474	30 421 084
24. Nias Utara	22 000 000	30 000 000
25. Nias Barat	8 576 100	20 000 000
<b>Kota/City</b>		
26. Sibolga	6 448 000	60 531 154
27. Tanjungbalai	1 198 526	5 940 728
28. Pematangsiantar	75 920 377	130 134 852
29. Tebing Tinggi	41 387 136	67 190 406
30. Medan	246 810 652	1 679 237 163
31. Binjai	6 500 000	88 674 387
32. Padanngsidimpuan	4 649 950	56 027 872
33. Gunungsitoli	13 986 750	34 400 000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>821 983 573</b>	<b>4 098 547 297</b>

Sumber/Source: BPS Provinsi Sumatera Utara/BPS-Statistic of Sumatera Utara Province



**KEUANGAN DAN HARGA-HARGA**  
**FINANCE AND PRICES**

**Lanjutan Tabel/Continued Table 10.1.6**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Lain-lain PAD yang sah <i>Others Receipt</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)
<b>Kabupaten/Regency</b>		
1. Nias	52 360 400	69 414 470
2. Mandailing Natal	31 876 898	85 508 995
3. Tapanuli Selatan	18 730 396	90 666 249
4. Tapanuli Tengah	37 618 000	64 005 291
5. Tapanuli Utara	19 383 704	67 183 704
6. Toba Samosir	15 824 000	37 451 580
7. Labuhanbatu	67 994 593	161 886 178
8. Asahan	47 900 000	104 816 668
9. Simalungun	41 378 823	119 980 275
10. Dairi	14 137 755	75 647 999
11. Karo	47 082 949	92 659 298
12. Deli Serdang	42 556 882	672 229 015
13. Langkat	48 152 873	115 313 352
14. Nias Selatan	3 865 152	14 110 807
15. Humbang Hasundutan	22 814 712	35 045 117
16. Pakpak Barat	7 389 045	15 235 167
17. Samosir	19 368 379	30 786 029
18. Serdang Bedagai	30 368 902	89 259 944
19. Batu Bara	20 590 645	50 426 645
20. Padang Lawas Utara	22 520 392	32 165 959
21. Padang Lawas	28 440 500	49 991 247
22. Labuhanbatu Selatan	14 185 338	41 169 542
23. Labuhanbatu Utara	11 724 502	35 236 054
24. Nias Utara	20 000 000	28 000 000
25. Nias Barat	12 576 100	24 000 000
<b>Kota/City</b>		
26. Sibolga	44 441 328	65 159 344
27. Tanjungbalai	23 238 353	63 898 624
28. Pematangsiantar	53 034 879	111 207 722
29. Tebing Tinggi	52 365 776	86 115 554
30. Medan	316 341 012	1 827 196 828
31. Binjai	7 199 431	88 674 387
32. Padanngsidimpuan	4 649 950	69 107 801
33. Gunungsitoli	14 058 000	28 000 000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 213 169 669</b>	<b>4 541 639 863</b>

Sumber/Source: BPS Provinsi Sumatera Utara/BPS-Statistic of Sumatera Utara Province

**Tabel 10.1.6**                      **Anggara Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota**  
**Table**                                  **Menurut Jenis Pendapapatan (Miliar-Rupiah), 2021**  
**Plan Regency/City Local Government Original Receipt By**  
**Types Of Receipt (Billion-Rupiahs), 2021**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government</i>	Dana Perimbangan <i>Balancing fund</i>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daeah yang Dipisahkan <i>Output Of</i> Management of Separated Regional Government Wealth
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kabupaten/Regency</b>			
1. Nias	5 005 000	2 421 000	9 000 000
2. Mandailing Natal	20 267 538	34 275 520	11 000 000
3. Tapanuli Selatan	17 370 629	8 905 927	40 360 000
4. Tapanuli Tengah	15 565 043	3 665 526	9 361 985
5. Tapanuli Utara	11 910 849	45 798 848	7 750 000
6. Toba Samosir	12 946 035	6 797 281	3 661 207
7. Labuhanbatu	49 550 000	11 617 949	15 000 000
8. Asahan	39 233 008	8 486 750	4 399 812
9. Simalungun	75 350 000	9 264 000	18 000 000
10. Dairi	9 266 000	30 666 560	10 029 770
11. Karo	40 794 923	13 322 128	2 800 000
12. Deli Serdang	484 520 000	112 795 775	19 800 000
13. Langkat	50 056 000	20 444 850	5 200 000
14. Nias Selatan	4 452 498	3 389 889	2 908 932
15. Humbang Hasundutan	6 029 770	4 573 173	2 683 962
16. Pakpak Barat	4 391 000	11 046 720	1 200 000
17. Samosir	13 130 000	5 085 880	3 269 597
18. Serdang Bedagai	51 067 000	16 087 440	-
19. Batu Bara	21 272 500	5 568 000	-
20. Padang Lawas Utara	6 880 372	10 199 677	-
21. Padang Lawas	12 874 786	5 568 000	4 600 00
22. Labuhanbatu Selatan	16 624 204	10 199 677	-
23. Labuhanbatu Utara	20 380 000	7 612 117	1 500 000
24. Nias Utara	3 945 000	1 360 000	500 000
25. Nias Barat	8 562 900	3 796 000	-
<b>Kota/City</b>			
26. Sibolga	7 965 377	5 011 755	14 398 829
27. Tanjungbalai	11 658 500	26 018 569	5 400 000
28. Pematangsiantar	39 730 000	7 754 773	10 162 494
29. Tebing Tinggi	21 357 000	4 155 778	13 000 000
30. Medan	1 380 127 548	257 773 650	12 181 227
31. Binjai	36 125 022	7 348 988	4 212 979
32. Padanngsidimpunan	15 032 780	13 478 789	12 832 046
33. Gunungsitoli	14 000 000	4 210 000	0
<b>Jumlah/Total</b>	<b>2 530 531 281</b>	<b>718 428 781</b>	<b>245 212 840</b>

**KEUANGAN DAN HARGA-HARGA**  
**FINANCE AND PRICES**

**Lanjutan Tabel/Continued Table 10.1.6**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Lain-lain PAD yang sah <i>Others Receipt</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)
<b>Kabupaten/Regency</b>		
1. Nias	60 769 210	77 22 210
2. Mandailing Natal	34 568 711	100 111 770
3. Tapanuli Selatan	14 799 291	81 435 847
4. Tapanuli Tengah	43 777 381	72 369 935
5. Tapanuli Utara	29 167 812	94 623 509
6. Toba Samosir	20 963 047	44 367 570
7. Labuhanbatu	87 821 740	163 989 690
8. Asahan	55 770 619	107 890 188
9. Simalungun	111 175 585	213 789 585
10. Dairi	16 382 000	66 344 330
11. Karo	47 082 949	104 000 000
12. Deli Serdang	45 500 000	662 615 775
13. Langkat	55 375 573	131 076 423
14. Nias Selatan	3 319 091	14 160 411
15. Humbang Hasundutan	28 392 406	41 679 311
16. Pakpak Barat	7 659 456	24 297 176
17. Samosir	51 770 200	73 255 677
18. Serdang Bedagai	35 325 421	102 479 861
19. Batu Bara	21 750 000	51 590 500
20. Padang Lawas Utara	18 070 392	35 150 441
21. Padang Lawas	29 684 500	52 299 754
22. Labuhanbatu Selatan	14 185 338	41 169 542
23. Labuhanbatu Utara	13 690 855	43 182 872
24. Nias Utara	26 200 000	32 005 000
25. Nias Barat	16 381 100	28 740 000
<b>Kota/City</b>		
26. Sibolga	51 078 452	78 148 890
27. Tanjungbalai	22 238 353	65 315 422
28. Pematangsiantar	60 501 623	118 148 890
29. Tebing Tinggi	58 840 921	97 353 699
30. Medan	323 697 914	1 973 780 339
31. Binjai	50 596 105	98 283 092
32. Padanngsidimpuan	49 953 384	91 296 999
33. Gunungsitoli	16 727 400	34 937 400
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 523 243 828</b>	<b>5 017 417 730</b>

Sumber/Source: BPS Provinsi Sumatera Utara/BPS-Statistic of Sumatera Utara Province

**Lampiran 1**

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN  
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2017-2021 (MILIAR RUPIAH)**

Tahun	Kabupaten/Kota	PAD	Dana Perimbangan	Pertumbuhan Ekonomi
2017	Nias Utara	7.000.000	500.000	12.500.000
2018		6.500.000	1.500.000	15.00.000
2019		6.500.000	1.500.000	30.000.000
2020		5.900.000	2.100.000	28.000.000
2021		3.945.000	1.360.000	32.005.000
2017	Nias Barat	3.600.000	2.000.000	8.200.000
2018		3.600.000	2.000.000	10.000.000
2019		7.594.400	3.829.500	20.000.000
2020		7.594.400	3.829.500	24.000.000
2021		8.562.900	3.796.00	28.740.000
2017	Nias Selatan	10.798.743	36.319.166	75.541.198
2018		17.748.994	37.203.232	75.541.198
2019		15.330.442	29.686.215	76.559.502
2020		3.932.834	4.785.675	50.640.920
2021		4.542.498	3.389.889	14.110.807
2017	Humbang Hasundutan	3.167.028	6.974.502	14.160.411
2018		3.961.715	17.640.162	15.212.701
2019		3.961.715	3.863.511	26.959.179
2020		5.159.233	4.458.583	27.752.527
2021		6.029.770	4.573.173	35.045.117
2017	Pakpak Barat	1.134.706	4.352.064	41.679.311
2018		1.186.534	4.816.911	9.335.245
2019		2.122.273	3.345.872	14.960.679
2020		1.998.842	4.247.300	15.235.187
2021		4.391.000	11.046.720	24.297.176
2017	Tanjung Balai	7.083.418	12.915.852	32.035.000
2018		8.583.418	14.488.537	34.409.306
2019		2.708.466	2.033.736	5.940.728
2020		10.658.500	25.601.771	63.898.624
2021		11.658.500	26.018.569	65.315.422



*Lampiran 2*

**HASIL MODEL *COMMON EFFECT***

Dependent Variabel : Pertumbuhan Ekonomi

Method: Panel Least Square

Sample : 2017 2021

Periode included: 5

Cross-section included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6991017.	31657212.	2.208356	0.0359
PAD	1.913441	0.662424	2.888544	0.0075
DP	1.051265	0.241855	4.346681	0.0002
R-squared	0.819644	Mean dependent var		28734416
Adjusted R-squared	0.806248	S.D. dependent var		19785780
S.E. of Regression	8708352.	Akaike info criterion		34.89210
Sum squared resid	2.05E+15	Schwarz criterion		35.03222
Log Likelihood	-520.3815	Hannan-Quinn criter		34.93693
F-Statistic	61.35184	Durbin-Waston stat		0.859414
Prob (F-Statistic)	0.000000			

*Lampiran 3*

**HASIL MODEL *FIXED EFFECT***

Dependent Variabel : Pertumbuhan Ekonomi

Method: Panel Least Square

Sample : 2017 2021

Periode included: 5

Cross-section included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5089898.	3962350.	1.284566	0.2123
PAD	2.015039	0.926758	2.174290	0.0407
DP	1.187027	0.350265	3.388942	0.0026

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.862013	Mean dependent var	28734416
Adjusted R-squared	0.818109	S.D. dependent var	19785780
S.E. of Regression	8438382.	Akaike info criterion	34.95766
Sum squared resid	1.57E+15	Schwarz criterion	35.33131
Log Likelihood	-516.3649	Hannan-Quinn criter	35.07719
F-Statistic	19.63369	Durbin-Waston stat	1.162520
Prob (F-Statistic)	0.000000		

*Lampiran 4*

**HASIL MODEL *RANDOM EFFECT***

Dependent Variabel : Pertumbuhan Ekonomi  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Sample : 2017 2021  
Periode included: 5  
Cross-section included: 6  
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6408400.	3613511.	1.773455	0.0874
PAD	1.954643	0.729332	2.680046	0.0124
DP	1.086153	0.268959	4.038513	0.0004
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3316559.	0.1338
Idiosyncratic random			8438382.	0.8662
Weighted Statistics				
R-squared	0.808441	Mean dependent var		21583646
Adjusted R-squared	0.794251	S.D. dependent var		18263951
S.E. of Regression	8284442.	Sum squared resid		1.85E+15
F-Statistic	56.97433	Durbin-Waston stat		0.952948
Prob (F-Statistic)	0.000000			
Weighted Statistics				
R-squared	0.818967	Mean dependent var		28734416
Sum squared resid	2.06E+15	Durbin-Waston stat		0.859206

### *Lampiran 5*

#### **Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Test  
Equation Untitled  
Test cross-section fixed effects

<b>Effects Test</b>	<b>Statistics</b>	<b>d.f.</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section F	1.351052	(5.22)	0.2805
Cross-section Chi-square	8.033348	5	0.1544

### *Lampiran 6*

#### **Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects-Hausman  
Equation Untitled  
Test cross-section Random effects

<b>Test Summary</b>	<b>Chi-Sq. Statistic</b>	<b>Chi-Sq. d.f</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section random	1.023871	2	0.5993

### *Lampiran 7*

#### **Hasil Uji LM**

Lagrange Multiplier Test for Random Effects  
Null hypotheses: No Effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	<b>Test Hypothesis</b>		
	<b>Cross-section</b>	<b>Time</b>	<b>Both</b>
Breusch-Pagan	1.319081	0.712133	2.031214
	(0.2508)	(0.3987)	(0.1541)